

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah suatu produk pengelolaan keuangan pemerintah daerah. LKPD sendiri merupakan sebuah bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah, LKPD disusun pada akhir periode sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah atas pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Komponen laporan keuangan pemerintah sendiri terdiri dari LRA, Neraca, LAK, LPSAL, LO, LPE, dan CaLK yang dimana penyajian disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan. Laporan keuangan yang disajikan dengan baik dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam hal mengelola sumber daya keuangan, baik dalam menyajikan informasi pelaporan keuangan, pelaksanaan anggaran serta evaluasi kinerja keuangan di masa depan (Gustina, 2021).

LKPD disusun oleh PPKD harus dapat memberikan informasi yang berguna bagi penggunaannya untuk menilai akuntabilitas serta membuat keputusan (PP 71 2010, paragraf 26 hal 8). LKPD yang disusun harus memenuhi kualitas yang telah di syartkan dalam SAP supaya informasi yang termuat di dalam LKPD dapat bermanfaat bagi penggunaannya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana di syartkan SAP sesuai

PP No 71 Tahun 2010 pada paragraf 35 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan serta mudah dipahami.

Setiap OPD diharuskan untuk menyusun laporan keuangan yang mana nantinya akan digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Setelah digabung menjadi LKPD, LKPD tidak akan langsung diterbitkan, tetapi harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). LKPD dapat dikatakan andal serta berkualitas apabila memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Dalam menyusun laporan keuangan dibutuhkan *skill* serta kompetensi yang memumpuni supaya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan terjaga, mengingat banyaknya kasus yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah (Gustina, 2021). Sumber Daya Manusia (SDM) dapat menjadi salah satu komponen yang bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi. Maka dari itu, kemampuan serta *skill* sangat diperlukan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Untuk dapat menghasilkan suatu laporan keuangan berkualitas dibutuhkan SDM yang berkompeten dan memahami aturan yang terdapat dalam SAP yang mana dijadikan bahan acuan menyusun laporan keuangan (Puspita et al., 2021). Dalam menyusun LKPD, PPKD yang bertugas menyusun laporan keuangan harus dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan yang telah di standarkan di SAP.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas SDM terhadap nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan, diantaranya penelitian yang telah dilakukan oleh (Hendri & NR, 2020) yang menunjukkan bahwasannya kualitas SDM memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dimana SDM merupakan faktor utama penggerak organisasi yang perlu dikelola dengan baik supaya dapat berkontribusi dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi. Apabila masing - masing individu dalam organisasi dapat berkontribusi dengan baik, maka secara keseluruhan kinerja suatu organisasi akan baik (Mahmudi, 2007).

SDM yang berkompeten serta didukung dengan teknologi informasi yang tepat diharapkan dapat mendukung dan mempercepat proses keandalan pelaporan keuangan daerah (Azlan et al., 2015). Hal ini mendukung terciptanya laporan keuangan yang baik dan berkualitas. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah bentuk dari pemanfaatan teknologi informasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). SIMDA sendiri merupakan sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan untuk memudahkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja.

Namun terdapat beberapa permasalahan dalam penggunaan SIMDA yang mengakibatkan kegagalan dalam SIMDA. Beberapa permasalahan yang terdapat dalam SIMDA pertama, kurang pemahaman atas SIMDA. Jika hal ini tidak diperbaiki, maka permasalahan ditimbulkan adalah keterlambatan proses penyimpanan dan input data operator SIMDA. Masalah kedua adalah kendala dalam *software* dan keterbatasan

jaringan. Jaringan yang lambat adalah faktor yang memperlambat pekerjaan dalam proses entri data. Ketiga yaitu komitmen pimpinan (Ramadhan et al., 2022). Dari permasalahan tersebut dapat menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak berkualitas

Berbeda dengan penelitian (Hendri & NR, 2020) yang menyatakan implementasi SIMDA tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Kualitas laporan keuangan kurang baik diduga karena kurangnya kemampuan pegawai dalam mengelola sistem informasi, yang mana hal ini dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang akan dihasilkan. Hal ini bertentangan (Ikriyati & Aprila, 2019) yang mengatakan implementasi SIMDA memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan, yang dimana semakin baik penerapan SIMDA maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang disajikan.

Faktor berikutnya yang berkaitan dengan kualitas LKPD yaitu penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam proses penyusunan LKPD. Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013, sejak tahun 2015 semua pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib menerapkan SAP Berbasis Akrua.

Basis Akrua sendiri merupakan teknik pencatatan akuntansi dimana pencatatan dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Penerapan SAP Berbasis Akrua sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyajian LKPD. Sedangkan manfaat dari penerapan SAP berbasis akrual adalah memberikan informasi yang akurat

untuk mengukur kinerja keuangan publik yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan serta menunjukan tanggungjawab entitas pelaporan atas sumber daya yang telah dipercayakan.

Berdasarkan (Ikriyati & Aprila, 2019) penerapan SAP memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan, sejalan dengan (Hendri & NR, 2020) bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas LKPD yang dihasilkan. Namun, berbeda dengan (Arza Oktriana, 2021) menyatakan bahwa penerapan SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD yang dihasilkan. Dikarenakan SDM yang kurang memahami teori akuntansi yang digunakan pada penyusunan laporan keuangan menjadi penyebab dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Sebuah keharusan bagi pemerintah untuk dapat menyusun laporan keuangan berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menggambarkan manajemen keuangan yang terkendali, yang meliputi administrasi yang terkendali serta kepatuhan terhadap prinsip. Oleh karena itu, pengendalian internal diperlukan untuk memastikan laporan keuangan yang disusun oleh PPKD telah sesuai standar yang berlaku. Menurut Jogiyanto (2007), pengendalian internal bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. Sebaliknya, menurut (Gustina, 2021), pengendalian internal diperlukan untuk lebih mudah menemukan atau menganalisis masalah yang ada atau masalah yang mungkin muncul dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan. Dimana salah satu pencapaian tujuan pemerintah daerah yaitu opini WTP dari BPK atas laporan keuangan yang dihasilkan.

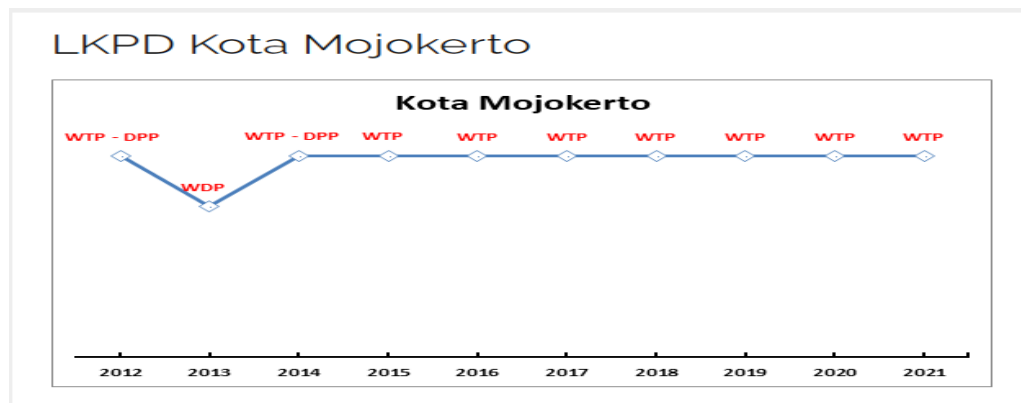
Bedasarkan penelitian (Ikriyati & Aprila, 2019) menunjukkan bahwa SPI terbukti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan (Mahartini et al., 2021) dan (Hartono & Ramdany, 2020) yang menyatakan bahwa SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Masih banyak kasus terkait kualitas LKPD di Indonesia yang masih harus diproses dan diinvestigasi lebih lanjut. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak pemerintah daerah yang belum menerima opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, dikarenakan penelitian sebelumnya yang masih kurang konsisten maka mendorong peneliti untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Mojokerto.

Kota Mojokerto merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kota Mojokerto sendiri merupakan kota dimana memiliki potensi sektor kreatif di bidang industri. Selain itu di tahun 2021 Pemerintah Kota Mojokerto berhasil meraih penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) terbaik III yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (kominfo.jatimprov.go.id). Dengan diperolehnya penghargaan tersebut tidak luput dari LKPD yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mojokerto, dimana LKPD yang dihasilkan dapat menunjukkan kinerja pemerintah yang baik dan menjadi acuan dalam menentukan kebijakan – kebijakan terkait dengan anggaran daerah. Maka dari itu peneliti memilih Pemerintah Daerah Kota Mojokerto sebagai objek penelitian peneliti. Peneliti melakukan penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui seberapa baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

Gambar 1.1 LHP LKPD Pemkot Mojokerto Tahun 2012 – 2021



Sumber : <https://jatim.bpk.go.id/hasil-pemeriksaan-laporan-keuangan-pemerintah-daerah/>

Fenomena pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto merupakan isu menarik yang perlu dikaji lebih lanjut. Dilansir dari <https://jatim.bpk.go.id/> diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Mojokerto berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD (LHP) tahun 2021. Prestasi ini berhasil diraih kedelapan kalinya oleh Pemerintah Kota Mojokerto, dimana sebelumnya selama delapan tahun berturut-turut, yakni dari tahun 2014-2021, yang mendapatkan keterangan WTP dari BPK. Pernyataan BPK atas Laporan Keuangan Kota Mojokerto menunjukkan bahwa Kota Mojokerto telah berhasil menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas sehingga fenomena ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem

Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(Studi Kasus Pemerintah Kota Mojokerto).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dipaparkan di latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang terbentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah implementasi SIMDA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah kompetensi sumber daya manusia, implementasi sistem informasi manajemen daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan untuk tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui pengaruh implementasi SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
4. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
5. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, implementasi sistem informasi manajemen daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu berkaitan dengan akuntansi sektor publik, khususnya tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, implementasi sistem informasi manajemen daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Serta menguji penggunaan *Agency Theory* oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976 dan *Stewardship Theory* oleh Lex Donaldson dan James H. Davis pada tahun 1989 dalam membantu menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian – penelitian mendatang.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa khususnya jurusan akuntansi untuk menambah pengetahuan dan wawasan mereka dalam bidang akuntansi sektor publik berkaitan dengan pengaruh

kompetensi sumber daya manusia, implementasi SIMDA, penerapan SAP, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi pegawai pemerintah daerah khususnya bidang keuangan yang bertanggungjawab dalam menyusun laporan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat selaku pengguna laporan keuangan terkait faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.